

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT**
(Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh:

DELLA YUNI ARIANTI

2019/19043040

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT

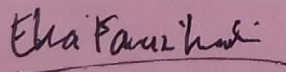
(Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin)

Nama : Della Yuni Arianti
TM/ NIM : 2019/19043040
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, September 2023

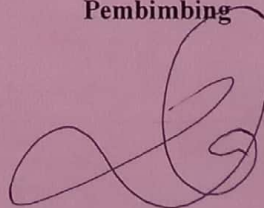
Disetujui oleh :

Ketua Departemen Akuntansi



Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE., M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

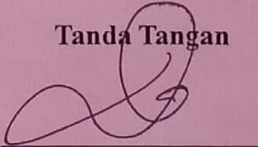
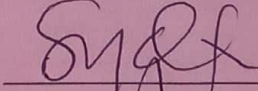
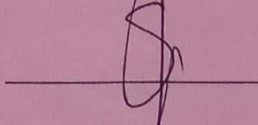
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT**

(Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin)

Nama : Della Yuni Arianti
TM/NIM : 2019/19043040
Departemen : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, September 2023

No	Jabatan	Tim Penguji	
		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Deviani, SE., M.Si, Ak	
2.	Anggota	Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D	
3.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Yuni Arianti
NIM/Tahun Masuk : 19043040/2019
Tempat/Tgl Lahir : Surian/17 Juni 2001
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Kulemban, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin,
Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
No. Hp : 0823 8609 7662
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa
Terhadap Kepercayaan Masyarakat (Suatu Persepsi dari
Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh pembimbing, Tim penguji dan Ketua Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, September 2023

Yang menyatakan,



Della Yuni Arianti
NIM. 19043040

ABSTRAK

Della Yuni Arianti, 19043040/2019. “Pengaruh *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat (Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good governance* (persepsi akuntabilitas, persepsi transparansi, dan persepsi *responsiveness*) dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Pantai Cermin dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*, adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan *software SPSS* versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial persepsi akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan persepsi transparansi dan *responsiveness* memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Secara simultan ketiga unsur *good governance* (persepsi akuntabilitas, persepsi transparansi, dan persepsi *responsiveness*) berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin.

Keywords: Akuntabilitas; *Good Governance*; Kepercayaan Masyarakat; *Responsiveness*; Transparansi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis kirimkan untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa nikmat dan cahaya Islam menerangi dunia yang penuh kejahiliahan.

Setelah melewati beberapa kali bimbingan, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat (Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin)”**. Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam proses pembuatannya tidaklah sedikit hambatan dan kesulitan yang ditemui penulis untuk menyelesaikannya. Namun berkat kemauan, kesabaran, tekad, semangat, serta dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi, perhatian, nasihat, do'a, kekuatan, dan bantuan keuangan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si. Ak selaku ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Deviani, SE., M.Si, Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, saran dan motivasi kepada penulis sampai proses pembuatan skripsi ini selesai.
5. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D selaku dosen penguji (1) dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si., selaku dosen penguji (2) yang telah memberikan banyak saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
7. Pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin yang telah bersedia membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian.
8. Sepupu seperjuangan Indah dan Via yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, serta selalu memberikan semangat dan motivasi satu sama lain agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
9. Kepada sahabat penulis Utii, Kak Fika dan Yopi yang tidak pernah lelah mendengarkan curhatan, memberikan masukan, dan menemani penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Departemen Akuntansi 2019, khususnya kelas B, terima kasih atas dukungan, saran, dan kebersamaan kita selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi balasan setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberi inspirasi dan pengalaman serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Padang, September 2023

Della Yuni Arianti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Teori Legitimasi	12
2. Dana Desa	13
a. Pengertian Desa.....	13
b. Pengertian Dana Desa	14
c. Tujuan Dana Desa	15
d. Pengelolaan Dana Desa.....	15
3. Persepsi	15
4. <i>Good Governance</i>	17
a. Akuntabilitas	18
b. Transparansi	20
c. <i>Responsiveness</i>	22
d. Indikator <i>Good Governance</i>	23
5. Kepercayaan Masyarakat	24
a. Pengertian Kepercayaan Masyarakat	24
b. Indikator Kepercayaan Masyarakat.....	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual	30
D. Pengembangan Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Populasi dan Sampel	36
1. Populasi	36
2. Sampel.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Variabel Penelitian	39
1. Variabel Dependen.....	39
2. Variabel Independen	39
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
1. Analisis Statistik Deskriptif	40
2. Pengujian Kualitas Data	42

a. Uji Validitas	42
b. Uji Reliabilitas	42
3. Uji Asumsi Klasik	43
a. Uji Normalitas	43
b. Uji Multikolinearitas	44
c. Uji Heteroskedastisitas	44
4. Pengujian Hipotesis	44
a. Model Regresi Linier Berganda	44
b. Uji t	45
c. Uji F	46
d. Koefisien Determinasi	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Demografi Responden	49
C. Uji Kualitas Data	51
1. Uji Validitas	51
2. Uji Reliabilitas	53
D. Uji Asumsi Klasik	54
1. Uji Normalitas	54
2. Uji Multikolinearitas	55
3. Uji Heterokedastisitas	56
E. Teknik Analisis Data	57
1. Analisis Hasil Deskriptif	57
F. Uji Hipotesis	60
1. Uji Regresi Linier Berganda	60
2. Uji t	62
3. Uji F	64
4. Uji Koefisien Determinasi	65
G. Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah alokasi dana desa kecamatan pantai cermin	6
Tabel 2 Kriteria pengukuran <i>skala likert</i>	38
Tabel 3 Instrumen penelitian.....	40
Tabel 4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 5 Jumlah Responden Berdasarkan Usia	50
Tabel 6 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel 7 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	51
Tabel 8 Uji Validitas	52
Tabel 9 Uji Reliabilitas	53
Tabel 10 Uji Normalitas.....	54
Tabel 11 Uji Multikolinearitas	55
Tabel 12 Uji Heterokedastisitas	56
Tabel 13 Analisis Deskriptif Persepsi Akuntabilitas	57
Tabel 14 Analisis Deskriptif Persepsi Transparansi	58
Tabel 15 Analisis Deskriptif Persepsi <i>Responsiveness</i>	59
Tabel 16 Analisis Deskriptif Kepercayaan Masyarakat.....	60
Tabel 17 Uji Regresi Berganda	61
Tabel 18 Uji t	63
Tabel 19 Uji F	65
Tabel 20 Uji Koefisien Determinasi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	30
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	81
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	83
Lampiran 3 Uji Kualitas data	94
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik	98
Lampiran 5 Uji Hipotesis	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan hak otonomi kepada desa. Dimana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa secara mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa pertama kali disalurkan pada tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat mendistribusikan dana desa melalui transfer ke kabupaten/kota, kemudian kabupaten/kota akan mendistribusikannya ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, karena dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam percepatan pembangunan desa (Sofyani & Tahar, 2021). Dalam

Yousaf et al. (2016) juga menyatakan bahwa warga negara dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah akan lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu kepercayaan dari masyarakat pada pemerintah merupakan sebuah kunci keberhasilan sistem demokrasi, karena merupakan salah satu komponen penting untuk keberlanjutan dan legitimasi sistem demokrasi (Bouckaert, 2012). Legitimasi berarti sebuah pengakuan dan penerimaan maupun dukungan dari masyarakat terhadap kekuasaan dan kewenangan (Hanifaturahmi, 2022). Salah satu faktor utama legitimasi adalah kepercayaan sosial, legitimasi akan mudah didapatkan apabila warga percaya kepada pemerintah dan perwakilan mereka (Gilley, 2006 dalam Nawawi, 2012). Pemimpin pemerintahan akan selalu berusaha untuk memperoleh legitimasi atas kekuasaannya sehingga memungkinkan apa yang dipimpinnya akan secara suka rela mematuhi aturannya (Hanifaturahmi, 2022).

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum di pandang saling berhubungan erat dengan *good governance*, dimana kepercayaan masyarakat dapat meningkat apabila pemerintahan memenuhi unsur-unsur *good governance* dalam menjalankan tugasnya (Yousaf et al., 2016). Menurut Popovski (2010) dalam Beshi & Kaur (2020) *good governance* merupakan kunci keberhasilan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang dibangun dengan kebijakan yang sehat. Sebagai dasar *good governance*, akuntabilitas, transparansi, dan *responsiveness* atau daya tanggap pemerintah merupakan syarat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Di tingkat

desa penerapan praktik tata kelola yang baik penting untuk dilakukan, agar bisa memastikan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan desa (Sofyani & Tahar, 2021). Praktik akuntabilitas, transparansi dan *responsiveness* merupakan unsur utama tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa, karena dengan adanya praktik tata kelola yang baik dapat mengurangi potensi munculnya skandal korupsi. Selain itu akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Nurrikkiana et al., 2017).

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas berarti pihak pemegang amanah (*agent*) berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta memaparkan segala aktivitas dan kegiatannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang meminta pertanggungjawaban tersebut. Ada dua jenis akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas vertikal yang berarti pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota dan akuntabilitas horizontal yang berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat banyak atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala (Imawan et al., 2019). Minja (2013) dalam Beshi & Kaur (2020) menyatakan bahwa kurangnya akuntabilitas telah mengakibatkan warga negara kehilangan kepercayaan pada pemerintah, dan dengan adanya informasi publik dapat digunakan untuk membuat pemerintah dan administrasinya transparan atau

terbuka kepada publik yang akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik (Gordon, 2000).

Selain akuntabilitas, dalam menunjang berjalannya pengelolaan dana desa dengan baik terdapat juga transparansi dan *responsiveness* atau daya tanggap pemerintah. Menurut Yousaf et al. (2016) transparansi mengacu pada kejelasan dan ketersediaan keputusan dan informasi bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap informasi tersebut. Grimmelikhuijsen (2012) berpendapat bahwa pengungkapan informasi kinerja pemerintah secara berkala sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya transparansi berarti pemerintah menunjukkan kepada masyarakat hasil dari kebijakan pemerintah melalui target dan indikator kinerja yang jelas, yang seharusnya menghasilkan peningkatan kepercayaan pada pemerintah.

Responsiveness atau daya tanggap pemerintah merupakan praktik yang diinginkan untuk mencapai pemerintahan yang baik dari perspektif warga negara (Yousaf et al., 2016). Pemerintah yang responsif berarti keyakinan bahwa pejabat pemerintah mendengarkan dan peduli tentang apa yang masyarakat inginkan (Mansoor, 2021). Daya tanggap pemerintah sangat penting karena kegagalan untuk memenuhi tuntutan atau permasalahan tepat waktu dapat menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah (Miller, 2015).

Masyarakat mengharapkan pemerintah bertanggungjawab atas semua pekerjaan mereka dan atas apa yang mereka lakukan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi (Beshi & Kaur, 2020). Ketika harapan tidak

terpenuhi, skandal dapat terjadi dan kepercayaan dapat terkikis (Hyndman & McConville, 2018). Menurut Judith et al. (2009) pemerintah yang tidak akuntabel dan transparan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sejak pertama kali dana desa dialokasikan terdapat beberapa oknum pemerintah desa yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat. Bahkan, kasusnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menemukan sektor anggaran dana desa merupakan sektor dengan kasus korupsi terbanyak, mencapai 154 kasus dengan jumlah kerugian senilai Rp 233 miliar. Kasus korupsi dana desa juga pernah terjadi di Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti pada tahun 2018 silam dengan total kerugian sekitar 800 juta rupiah. Hal-hal tersebut pada akhirnya membuat banyak masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena pemerintah yang kurang terbuka dalam pengelolaan keuangan tersebut, tak terkecuali di Kecamatan Pantai Cermin yang merupakan batas sebelah selatan dari Kecamatan Hiliran Gumanti.

Dana desa yang diterima oleh nagari yang ada di Kecamatan Pantai Cermin terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perolehan jumlah alokasi dana desa untuk Kecamatan Pantai Cermin adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Kecamatan Pantai Cermin

Tahun	Nama Nagari	
	Surian	Lolo
2018	1.361.029.000	830.358.000
2019	1.785.652.000	993.630.000
2020	1.887.624.000	1.086.660.000
2021	2.034.803.000	1.112.303.000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Peningkatan alokasi dana desa ini tentu harus diikuti dengan penggunaan dana yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun fakta dilapangan tidak menunjukkan hal yang demikian, dimana dalam melakukan pengelolaan dana desa, pemerintah nagari yang ada di Kecamatan Pantai Cermin kurang memberikan informasi kepada masyarakat terkait rincian pengelolaan dana desa. Hal ini tentu menyebabkan keraguan di masyarakat mengenai pengelolaan dana desa karena tidak adanya baliho atau papan informasi mengenai pengelolaan dana desa yang bisa digunakan masyarakat umum sebagai informasi tentang penggunaan dana desa. Selain itu minimnya keterlibatan masyarakat luas dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa juga ikut menimbulkan keraguan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Beshi & Kaur (2020) menemukan bahwa praktik transparansi, akuntabilitas dan daya tanggap yang dirasakan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transparansi secara lebih luas bergantung kepada gagasan bahwa semakin banyak negara menunjukkan kepada publik semakin banyak pula keinginan publik untuk mempercayai negara. Dan ketika pemerintah mempraktikkan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, hal itu cenderung membuat warga negara merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Selain itu daya tanggap memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, pemerintah harus berperan dalam mengelola tuntutan warga negaranya dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mansoor (2021) dan Yousaf et al. (2016) yang menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan daya tanggap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, ini berarti bahwa akuntabilitas, transparansi dan daya tanggap diperlukan untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Nurrizkiana et al. (2017) juga mengemukakan hal yang serupa bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan mempengaruhi tingkat kepercayaan *stakeholder*.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2019) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi anggaran desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik, sedangkan transparansi tidak. Sofyani & Tahar (2021) sebaliknya mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik dalam masyarakat desa, sedangkan akuntabilitas tidak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratolo et al. (2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan kepercayaan publik mempunyai hubungan negatif signifikan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran tidak terkait dengan kepercayaan publik secara langsung maupun tidak langsung. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya ini telah menciptakan kesenjangan penelitian.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana terhadap kepercayaan masyarakat yang dilakukan di Indonesia (Apriliana, 2019; Nurrizkiana et al., 2017; Sofyani & Tahar, 2021; dan Pratolo et al., 2022) lebih difokuskan kepada bagaimana perspektif dari sisi pemerintah mengenai hal tersebut, sedangkan dari sisi masyarakat tidak begitu diperhatikan. Dalam penelitian yang dilakukan Imawan et al. (2019) menyarankan agar penelitian selanjutnya memperbanyak informan atau responden dari sisi masyarakat agar peneliti memperoleh data yang lebih lengkap terkait dengan akuntabilitas horizontal. Lebih lanjut Imawan menyarankan agar pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Selain itu riset ini juga menambahkan *responsiveness* atau pemerintah yang responsif sebagai unsur tata kelola yang

baik, dimana di Indonesia ada kekurangan penelitian untuk menyelidiki dampak dari ketiga unsur *good governance* (akuntabilitas, transparansi, dan *responsiveness*) tersebut secara bersamaan (Hartanto et al., 2021).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Beshi & Kaur (2020) yang meneliti pengaruh praktik *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah yang dilakukan di Kota Bahir Dar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dan waktu penelitian yang berbeda serta penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini. Hasil riset ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan teori legitimasi dengan menjelaskan bahwa tata kelola yang baik perlu dilaksanakan di tingkat desa sebagai strategi utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan pada gilirannya pemerintah bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan diatas, dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat (Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin?
2. Apakah transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin?
3. Apakah *responsiveness* berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin.
3. Untuk mengetahui pengaruh *responsiveness* terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh dari *good governance* dalam pengelolaan dan desa terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori serta dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi yang akan melakukan penelitian kembali dengan topik yang serupa.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah desa mengenai pentingnya tata kelola yang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.